



Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT)

Ahmad Murajid¹, Muhammad Hasan², Nurdiana³, Mustari^{4*}
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

Article History

Received Oktober 10, 2022
Approved November 14, 2022
Published Desember 07, 2022

Keywords

*Covid-19,
Implementation of The BLT Program,
The Impact of The BLT Program.*

JEL Clasification

M10

How to Cite

Ahmad Murajid, Muhammad Hasan, Nurdiana, Mustari (2022). Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 381-395

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of policies and the impact of the 2020 BLT program on poverty alleviation in Anrihua Village, Kindang District, Bulukumba Regency. This research is categorized as a Descriptive Qualitative research. Data were obtained through the results of interviews which were carried out within 3 months from December 2021 to February 2022. Based on the results of the interviews, the implementation of the BLT program in Anrihua Village has so far been running smoothly because the local government always tries to maximize BLT program and find solutions to problems that exist in the community. In addition, the BLT program in Anrihua Village has a positive impact because it can increase community income for additional business capital, capital for people's daily basic needs, and increase people's purchasing power.

*Mustari

Jl. Raya Pendidikan Kampus Universitas Negeri Makassar
Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
e-mail: mustari7105@unm.ac.id



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan masalah sosial yang meluas yang mempengaruhi semua aspek masyarakat. Kemiskinan adalah masalah di bidang sosial, dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat (Akib, et al, 2016). Tidak hanya di negara berkembang, bahkan di negara maju dengan keadaan yang sangat buruk, kemiskinan itu sendiri telah ada di semua lapisan masyarakat. Menurut Sugiyarto dkk. (2015), sebagian besar penduduk miskin baik di negara berkembang maupun negara maju tinggal di daerah pedesaan, dengan beberapa juga tinggal di daerah metropolitan yang warganya telah bermigrasi dari daerah pedesaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana disyaratkan oleh alinea keempat UUD 1945, pemerintah telah menunjukkan minat yang besar terhadap pembangunan warga negara yang adil dan makmur sejak Indonesia merdeka. Karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masalah ini terwakili dalam banyak program pembangunan yang telah ditampilkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian yang signifikan terhadap upaya untuk memecahkan tantangan ekonomi (Syafuruddin, et al 2021).

Menurut Yacoub (2012), yang melakukan penelitian untuk bukunya, kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar karena mempengaruhi banyak negara. Masalah paling luar biasa yang pernah melanda Indonesia adalah kemiskinan. Jutaan anak di negara ini tidak dapat menerima pendidikan berkualitas tinggi karena kemiskinan, yang juga menyebabkan mereka berjuang dengan masalah kesehatan, kurangnya tabungan yang menghalangi mereka untuk berinvestasi, kurangnya akses ke layanan publik, kurangnya kesempatan kerja, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga, dan penguatan urbanisasi. kota, dan yang lebih buruk lagi, kemiskinan memaksa jutaan orang untuk berjuang demi sedikit tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan sandang mereka. Menurut Tiwari (2016), penting untuk menggunakan metrik yang memperhitungkan ketersediaan, aksesibilitas, penggunaan, dan stabilitas empat komponen utama ketahanan pangan. Kuantitas makanan yang benar-benar dapat diakses adalah prediktor yang baik dari ketersediaan makanan. Menurut Subanti (2016), konsumsi rumah tangga beras, umbi-umbian, sayuran, dan tembakau meningkat di Jawa Tengah sebagai akibat dari bantuan tunai, tetapi konsumsi ikan, daging, telur, dan susu, buah, dan paket makanan dan minuman menurun.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan (Todaro). Menurut definisi kemiskinan, itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan (BPS). Kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal uang dan konsumsi, adalah keadaan yang dikenal sebagai kemiskinan (Jacobus, 2018). Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan strategi yang terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan karena mempengaruhi beberapa sektor, wilayah geografis, dan generasi. Kemiskinan memiliki banyak aspek yang berbeda dan mungkin ada di mana-mana. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah



secara konsisten melakukan inisiatif untuk menguranginya. Upaya ini cukup serius dan telah ditingkatkan statusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah (Gultom, 2010)

Enam jenis indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan: lapangan kerja, perumahan, pangan, kesehatan, dan pendidikan (Muhammad, 2019). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menurunkan jumlah dan proporsi penduduk miskin. Salah memilih keluarga binaan merupakan salah satu masalah utama pelaksanaan BLT. Sebaliknya, masih ada rumah kaya yang mendapatkan BLT. Masih ada rumah tangga miskin yang tidak menerima BLT (Rosfadhila 2013). Sudut pandang kemiskinan pendapatan, yang menggunakan uang sebagai satu-satunya indikasi "garis kemiskinan", memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kemiskinan diukur (Edi Suharto). Stabilitas ekonomi terganggu oleh kemiskinan, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Ketika pendapatan naik dan batas asupan kalori tercapai, anggaran makanan akan berubah untuk memasukkan barang-barang berkualitas lebih tinggi seperti buah, sayuran, dan daging (Pieters 2012). Pemerintah harus mengambil sikap proaktif dalam memerangi kemiskinan. Hal ini karena keterlibatan pemerintah dalam distribusi, alokasi, dan stabilitas.

Jika tujuan pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, ingin dicapai, keterlibatan pemerintah merupakan syarat yang harus dipenuhi. Besaran dana yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan menjadi tolak ukur pengentasan kemiskinan dan isu-isu pembangunan lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mencantumkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu strategi pembangunan untuk tahun 2004 sampai 2009, dengan tujuan menurunkan kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Jika daya beli masyarakat dapat terus meningkat, tujuan akan tercapai. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, rencana, strategi, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Sejak masa kolonial, langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan, sebagian besar melalui transmigrasi. Dengan memberikan harapan segar dalam upaya meningkatkan pendapatan, program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah individu miskin dalam suatu komunitas selain mempromosikan kesetaraan demografis.

Penurunan pendapatan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita). Amrullah (2019) mengamati bahwa pada tahun 2015, antara 26,6 persen hingga 20,8 persen keluarga Indonesia mengalami kerawanan pangan. Menurut Lembaga Penelitian SMERU (2021), pandemi menyebabkan pendapatan turun 75% rumah tangga. Jumlah pelanggan dan omset perusahaan menurun sebanyak 66 persen keluarga dengan usaha kecil. Selain itu, tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,7 juta orang pada Agustus 2020. Sementara itu, dibandingkan dengan upah



nominal sebelum pandemi, upah rata-rata pekerja atau buruh turun -5,2 persen. Sejak tahun 2020, pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah khusus (luar biasa) untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seluruhnya diperuntukkan bagi kebutuhan pemerintah. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa tahun 2020.

Tenggara Kota Makassar terletak Kabupaten Bulukumba, sebuah wilayah yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah penduduk 420.603 ribu jiwa, kabupaten ini terdiri dari 109 permukiman, 27 kelurahan, dan 10 kelurahan. Mata pencaharian sebagian besar petani dan nelayan (BPS Kabupaten Bulukumba). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba melaporkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 7,48%, 7,26% pada 2019, dan 7,10% pada tahun 2020.

Kemiskinan merupakan masalah yang menimpa banyak masyarakat, terutama daerah-daerah terpencil yang tidak berada dalam kendali pemerintah. Dengan jumlah penduduk 4.321 ribu jiwa, Desa Anrihua merupakan salah satu desa di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Ketimpangan sosial, mata pencaharian yang tidak stabil, pendidikan, kurangnya prospek pekerjaan, sarana dan prasarana di bawah standar, dan pandemi COVID-19 yang berpengaruh signifikan terhadap gaji masyarakat, semuanya menjadi faktor penyebab tumbuhnya masalah kemiskinan di masyarakat.

Menurut data perhitungan Pemerintah Desa mengenai angka kemiskinan di Desa Anrihua mencapai 0% berada pada angka 10,67%, presentase warga desa bidang kesehatan dan ketenagakerjaan 100% berada pada angka 8,28%, keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% berada pada angka 28,42%, keluarga miskin mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% berada pada angka 60,68% dan keluarga miskin korban bencana yang di tangani mencapai 0% berada pada angka 0%. Dilihat dari presentase perhitungan kemiskinan Pemerintah Desa tersebut, keluarga miskin penerima bantuan sosial berada pada angka tertinggi kedua untuk ketegori penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mendapat perhatian yang besar agar angka kemiskinan di desa bisa diminimalisir.

Penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Desa Anrihua, karena persoalannya cukup kompleks. Untuk mendistribusikan program bantuan sosial dari pemerintah federal kepada penduduk Desa Anrihua dengan tepat dan memerangi kemiskinan di desa, pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Desa Anrihua memanfaatkannya secara maksimal. Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebuah program bantuan sosial yang dimulai pemerintah pada tahun 2005 dan masih



berjalan hingga saat ini, adalah salah satunya. Menurut Nurmiza (2015), kehadiran bantuan masyarakat membuat masyarakat bergantung pada pemerintah dan mengajarkan masyarakat untuk selalu mengantisipasi dukungan dari pemerintah. Ada kecemburuan sosial di lingkungan sekitar. Satu pihak memperoleh BLT sementara yang lain tidak, meskipun memiliki status ekonomi yang sama. Ketika individu yang tidak mendapatkan program merasa iri dengan mereka yang melakukannya, ini adalah kecemburuan. Namun mulai tahun 2020, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mengubah aturan yang mengatur distribusinya dalam upaya memerangi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19. Kebijakan ini mencakup realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seluruhnya ditujukan untuk tujuan tersebut, dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan. khusus untuk warga Kecamatan Kindang, Desa Anrihua Kabupaten Bulukumba. Sesuai latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas tentang “Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan data dan fakta dunia nyata, studi deskriptif mencoba menggambarkan ciri-ciri (karakteristik) skenario yang menangkap realitas penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.

Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tabel berikut mencantumkan 3 orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Tabel 1. Partisipan dalam Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Rijal S.Pd	Sekretaris Desa
2.	Muflihuddin Banira	Aparatur Desa
3.	Muhammad adnan	Aparatur Desa
4.	Syamsul Bahri	BPD
5.	Muhammad Beni Sugianto	Tokoh Pemuda
6.	Ismail S.Pd	Tokoh Masyarakat
7.	Dg. Hasinang	Tokoh Masyarakat
8.	Dg. Raho	Tokoh Masyarakat
9.	Dg. Niar	Tokoh Masyarakat
10.	Dg. Riama	Tokoh Masyarakat
11.	Salmi S.Pd	Tokoh Masyarakat
12.	Bapak Dg. Karim	Tokoh Masyarakat
13.	Dg. Aru Labani	Penerima BLT



HASIL DAN DISKUSI

1. Kondisi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

Masyarakat Desa Anrihua termasuk dalam kelompok kaya dari segi ekonomi berdasarkan harta benda dan tingkat pendapatan, namun sejak wabah COVID-19 terjadi penurunan jumlah pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan aparat Desa Anrihua yang ikut menjadi informan dalam penelitian tersebut, salah satunya Muhammad Rijal S.Pd., mengaku warga Desa Anrihua sebelumnya termasuk dalam kategori orang kaya. Namun, sejak pandemi COVID-19, terjadi penurunan tingkat pendapatan masyarakat, mulai dari petani yang akses ke kebunnya dibatasi hingga karyawan yang di-PHK. Harapan besar masyarakat terhadap pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat membantu perekonomian yang sedang terpuruk akibat wabah tersebut. Beliau juga menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum terjadi pandemi COVID-19 menurutnya, Desa Anrihua adalah salah satu desa penghasil komoditi cengkeh terbanyak di Kabupaten Bulukumba, dengan potensi sumber daya alam tersebut mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Muhammad Rijal S.Pd. kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. yang disampaikan sebagai berikut:

“Kondisi masyarakat Desa Anrihua cukup baik, walaupun terjadi penurunan pendapatan masyarakat sejak pendemi Covid-19 karna terjadi PHK dan terbatasnya petani dalam mengakses kebun mereka. Namun berbagai bantuan telah di salurkan baik BLT Desa, PKH, dan juga BPNT yang sejauh ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu Desa kami juga merupakan salah satu penyalur komoditi cengkeh terbesar di kabupaten bulukumba di karenakan mayoritas masyarakat kami adalah petani cengkeh dan hasil bumi ini cukup menjanjikan di Desa kami dan cukup membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.”

Peneliti berbicara dengan salah satu masyarakat yang menerima BLT untuk mempelajari lebih lanjut tentang dampak ekonomi masyarakat, dan mereka melaporkan bahwa:

“Saya yakin bantuan BLT ini sangat bermanfaat baik bagi perekonomian saya sendiri maupun para korban pandemi COVID-19. Saya juga merasa diuntungkan karena BLT ini mendukung keuangan keluarga saya, terutama untuk kebutuhan pokok, dan pemerintah telah memberlakukan aturan penguncian yang membatasi operasi kami di kebun dan juga beberapa individu telah diberhentikan. Oleh karena itu, saya yakin BLT dapat membantu pemerintah mengatasi dampak ekonomi dan bahkan mengurangi kemiskinan”



Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat mengurangi dampak finansial dari wabah COVID-19, mendukung perekonomian lokal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan meningkatkan daya beli konsumen.

2. Kondisi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosial Dan Budaya

Kebiasaan masyarakat Desa Anrihua juga sangat terlihat saat perayaan hari-hari besar yang di rayakan dengan bersilaturahmi tak hanya dengan keluarga terdekat namun juga di rayakan bersama tetangga-tetangga terdekat. Di sisi lain, orang-orang juga kurang menghargai status sosial dalam masyarakat, namun mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa prasangka. Ini pasti akan mengarah pada kehidupan sosial yang berkembang. Menurut Bapak Muhammad Rijal S.Pd., sekretaris Desa Anrihua, yang menyatakan bahwa:

“Nilai-nilai sosial di Desa kami seperti gotong royong, silaturahmi saat perayaan hari besar dan juga ketika ada acara-acara tertentu masih sangat di lestariakan, karna nilai sosial yang dari luhur masih sangat kental di pahami masyarakat Desa kami. Terbukti saat hari raya orang berkumpul untuk tetap bersilaturahmi, tidak hanya keluarga tapi juga tetangga. Misalnya, jika ada hajatan atau akad nikah, keluarga atau tetangga akan datang bekerja sama”

Menurut Teori Paradigma Demokratis, metode pengentasan kemiskinan memandang kemiskinan sebagai masalah struktural daripada masalah yang hanya mempengaruhi satu orang (Cheyne, et al, 1998). Kemiskinan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori ini menekankan peran pemerintah untuk dapat memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi sosial, dimana mereka mampu menentukan pilihan dan memenuhi kebutuhannya. Untuk perspektif ini, akses tertutup untuk kelompok tertentu adalah penyebab kemiskinan.

Dalam implementasi BLT sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dalam pelaksanaannya tentunya memiliki kendala-kendala yang terdapat dalamnya. Salah satu kendala yang sering di dapati dalam pelaksanaan program BLT adalah masih terdapatnya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT, contoh lain masalah yang sering terjadi misalnya terdapat beberapa masyarakat yang tidak terima ketetapan pelaksana BLT terkait daftar orang-orang yang menerima bantuan BLT. Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi atas permasalahan yang sering muncul selama penerapan program BLT. Komunitas penerima BLT dapat menangani sendiri uang yang mereka peroleh, yang memberikan keunggulan dibandingkan bentuk bantuan lainnya.

Bantuan langsung Tunai (BLT) sebagai program dalam upaya menaggulangi tingkat kemiskinan di desa Anrihua memang tidak secara langsung berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan daya beli masyarakat, namun program ini dapat



membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu aparatur desa, bapak Muflihuddin Banira ketika di wawancarai mengenai bagaimana implementasi BLT dan bagaimana dampak BLT dalam penanggulangan kemiskinan di desa Anrihua, yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan implementasi program BLT di desa kami sejauh ini terbilang lancar namun memang terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, misalnya dalam pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan, terkadang terdapat beberapa kendala yang kami dapati namun kami selaku pemerintah setempat selalu berusaha memaksimalkan program dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Meskipun program BLT tidak berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di desa kami, namun dengan bantuannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Program BLT membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama ketika harga produk meningkat. Beberapa penerima bantuan sangat membutuhkan bantuan, seperti BLT, yang dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai modal kerja. Beban sehari-hari penerima manfaat, seperti biaya pembelian makanan dan kebutuhan dapur lainnya, dapat dikurangi dengan BLT”

Hal yang sama dituturkan oleh bapak Muhammad Rijal S.Pd. selaku sekretaris desa ketika diwawancarai terkait implementasi dan dampak BLT terhadap kemiskinan di desa Anrihua, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai implementasi BLT di desa kami sejauh ini berjalan dengan lancar, walaupun dampak program ini tidak secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di desa kami, namun saya berharap dengan adanya program bantuan seperti ini perlahan bisa mengurangi angka kemiskinan di desa kami. Terkait pelaksanaan program BLT ini memang terdapat beberapa kendala namun allhamdulillah kami selaku pemerintah selalu berusaha memberikan solusi terbaik bagi masyarakat, dan sejauh ini tanggapan masyarakat penerima bantuan terbilang positif dikarenakan masyarakat cukup terbantu dengan kondisi pendapatan masyarakat sekarang yang menurun.”

Bapak Muhammad adnan selaku aparat desa ketika diwawancarai juga mengatakan hal yang sama, menurutnya implementasi BLT sejauh ini terbilang lancar dengan respon positif dari masyarakat penerima bantuan walaupun belum berdampak secara langsung dalam mengurangi angka kemiskinan di desa Anrihua, yang menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah, sejauh ini pelaksanaan bantuan langsung tunai cukup lancar, bisa kita nilai dari respon masyarakat yang cukup positif, saya kira dengan masa pandemi seperti ini yang kebanyakan pendapatan masyarakat menurun itu bakal cukup membantu. Dari segi dampak program ini memang



belum berdampak secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di desa kami, namun kami bakal berupaya untuk memaksimalkan program bantuan yang ada.”

Salah satu BPD dari Desa Anrihua Syamsul Bahri juga memberi penjelasan yang sama, beliau menuturkan bahwa:

“Sama seperti apa yang di tuturkan informan anda sebelumnya, sejauh ini implementasi BLT cukup lancar karna respon penerima juga positif saya kira juga masyarakat memang sangat terbantu dengan bantuan seperti ini di masa pandemi.”

Hal tersebut berbeda dari apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad Beni Sugianto selaku tokoh pemuda desa Anrihua, beliau menuturkan bahwa:

“Implementasi BLT belum bisa di katakan berjalan cukup lancar, karena masih ada beberapa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan BLT namun tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan saya kira pemerintah harus betul-betul jeli dalam melihat masyarakat mana yang bisa menerima bantuan BLT.”

Penuturan dari bapak Muhammad Beni Sugianto ditanggapi berbeda oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Ismail S.Pd., yang mengatakan bahwa:

“Memang betul masih ada beberapa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dalam daftar penerima, namun perlu di ketahui bantuan BLT masih tetap berjalan dan akan berlanjut di tahun depan jadi masyarakat yang belum menima bisa terdaftar namanya di pendataan selanjutnya.”

Implementasi BLT dapat dilihat dari bagaimana dampak yang di berikan terhadap masyarakat dengan begitu keberhasilan program ini dapat di nilai hasilnya. Ketika ditanya, salah satu aparat mengatakan bahwa:

“BLT memang membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama ketika harga produk meningkat. Beberapa penerima, termasuk yang mendapatkan BLT, yang dapat digunakan baik sebagai modal perusahaan maupun dana kebutuhan sehari-hari, justru membutuhkan bantuan. BLT dapat mengurangi beban sehari-hari penerima dengan membantu mereka membayar makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa penerima menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kami pemerintah setempat dan itu artinya bantuan ini berdampak baik bagi masyarakat miskin.”

Pak Hasinang juga mengatakan hal yang sama bahwa:



“Saya merasa terbantu ketika dukungan keuangan langsung ditawarkan. Saya menghabiskan uang untuk kebutuhan dapur karena saya tidak mengumpulkan cengkeh dalam dua tahun terakhir karena tidak menghasilkan buah.”

Berbeda dari yang diungkapkan bapak Dg. Hasinang, bapak Dg. Raho mengatakan bahwa:

“Karena saya punya kios, uang BLT saya manfaatkan sebagai tambahan modal jual.”

Hal senada juga diutarakan oleh Dg. Ibu Raho, Ibu Dg. Niar, seorang penjual kue. Ibu Dg. Niar memanfaatkan dana BLT sebagai tambahan modal karena dananya tidak mencukupi. Dia mengklaim:

“Uang tunai saya sangat sedikit, jadi saya menggunakan uang BLT sebagai uang tambahan untuk membeli perlengkapan kue. BLT ini dapat mengakomodasi kebutuhan trading saya”

Menurut temuan studi Harwidiyansyah (2011), masyarakat miskin percaya bahwa BLT lebih berharga daripada bantuan dalam bentuk sembako karena mereka bisa mengatur uang untuk membeli barang sesuai kebutuhan mereka. Uang BLT yang diperoleh masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurut sumber penerima BLT yang dihubungi untuk penelitian ini.

Ia memanfaatkan uang BLT sebagai tambahan modal usaha, seperti yang juga disampaikan oleh Ibu Dg. Riama. Dia mengklaim:

“Walaupun BLT tidak bisa menghilangkan kemiskinan, tapi dengan bantuan BLT ini kami sedikit terbantu apalagi dengan tanaman cengkeh yang tidak berbuah dan efek dari pandemi COVID-19. Uang dari bantuan BLT ini bisa di jadikan sebagai modal usaha dan supaya bisa membantu meningkatkan taraf hidup kami.”

Salah satu tokoh masyarakat ketika di wawancarai mengutarakan pendapatnya, beliau mengatakan bahwa:

“Program BLT dapat membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Tapi bukan hanya kebutuhan pokok yang mampu terpenuhi namun kebutuhan – kebutuhan lainnya juga karna penerima mampu mengolah dan mengatur sendiri bantuan yang ia terima karena berupa uang dan ketika di tanya apakah BLT berdampak pada menurunnya angka kemiskina, sejauh ini memang belum berdampak secara langsung namun tentunya besar harapan saya bantuan ini benar-benar bisa membantu kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat miskin di desa kami, karena program ini merupakan upaya pemerintah



untuk menanggulangi kemiskinan atau membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka.”

Salah satu masyarakat desa Anrihua, ibu Salmi S.Pd. juga berpendapat terkait BLT, beliau mengungkapkan bahwa:

“Program BLT dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya kebutuhan pokok mereka. Namun, karena penerima mampu mengolah dan mengelola bantuan yang diterimanya karena berupa uang, maka bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dapat dipenuhi; kebutuhan lainnya juga. Ketika ditanya apakah BLT berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentu saya sangat berharap bantuan ini benar-benar dapat membantu. Karena program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan atau membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya, maka akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.”

Program BLT menawarkan banyak manfaat, tetapi ada juga masalah dalam implementasinya. Masalah terbesar dalam pelaksanaan program BLT di Indonesia adalah database masih belum diperbarui di sejumlah besar kabupaten. Ketepatan alokasi dana BLT kepada orang-orang yang memenuhi syarat akan tergantung pada seberapa andal statistik orang miskin tersebut. Kebutuhan dasar diberikan prioritas tertinggi saat menerima bantuan keuangan, menurut studi Elinpiké dari tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diberikan prioritas utama, kebutuhan dasar belum cukup dipenuhi oleh bantuan langsung tunai kepada orang miskin. Namun, program bantuan keuangan langsung yang ada dari keuangan desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat miskin, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka.

Di sisi lain, terdapat beberapa masyarakat penerima BLT yang mempunyai pandangan lain terhadap BLT kali, beberapa masyarakat menilai BLT masih belum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, salah satu penerima bantuan BLT, bapak Dg. Aru Labani mengutarakan dalam wawancaranya bahwa:

“Memang bantuan ini membantu kami pada saat pandemi, namun saya beranggapan bantuan kali ini bersifat sementara dan bantuan yang di berikan juga terbatas hanya berupa uang Rp. 300.000,- dan hanya bisa menutupi kebutuhan sehari – hari.”

Menurut Elinpiké (2010), BLT memiliki pengaruh yang kecil terhadap kinerja masyarakat miskin karena mereka tidak dapat bertahan hidup jika itu adalah satu-satunya sumber uang mereka. Menurut Nurmi (2015), kehadiran bantuan masyarakat membuat masyarakat bergantung pada pemerintah dan mengajarkan masyarakat untuk selalu mengantisipasi dukungan dari pemerintah. Ada kecemburuan sosial di lingkungan sekitar. Satu pihak memperoleh BLT sementara



yang lain tidak, meskipun memiliki status ekonomi yang sama. Ketika individu yang tidak mendapatkan program merasa iri dengan mereka yang melakukannya, ini adalah kecemburuan. Saat wawancara, Bpk. Dg. Karim menyatakan:

“Ketika saya mendengar adanya bantuan seperti ini (BLT) saya sangat berharap saya juga bisa menerima bantuan tersebut karna sudah lama saya hidup susah, tapi saya lihat ada penerima lain yang saya rasa lebih banyak masyarakat yang lain yang lebih berhak untuk menerima termasuk saya pribadi, karena beberapa tahun terakhir ini hasil kebun sangat minim apalagi cengkeh sudah beberapa tahun tidak berbuah jadi saya sangat berharap bantuan dari pemerintah.”

Pendekatan Paradigma Sosial Demokrat menekankan peran pemerintah sebagai ujung tombak untuk dapat memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi sosial, memungkinkan mereka untuk menentukan pilihan dan memenuhi kebutuhannya. Penulis dapat menilai peran pemerintah seperti dalam teori ini dengan menggunakan berbagai perspektif yang dikemukakan di atas. Banyaknya penerima bantuan yang mengaku merasa terbantu dan berusaha memanfaatkan dukungan yang diperolehnya untuk meningkatkan taraf hidupnya menunjukkan bahwa kebutuhannya telah terpenuhi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Anrihua sudah berjalan baik, sesuai dengan temuan penelitian tentang dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi pada pelaksanaan dari BLT). Terlepas dari kenyataan bahwa bantuan ini tidak berhasil di banyak komunitas, desa Anrihua meresponsnya dengan baik. Bagi masyarakat miskin, Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantu karena dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memulai usaha, mendanai kebutuhan sehari-hari, dan meningkatkan daya beli. Penulis menyarankan kepada pemerintah daerah atau pusat untuk mengevaluasi kembali jumlah bantuan langsung tunai yang diberikan, karena diyakini tidak mencukupi dan akan mencegah permintaan jangka panjang masyarakat untuk tambahan modal usaha tidak terpenuhi sepenuhnya. Kajian di desa Anrihua mengungkapkan bahwa BLT memiliki pengaruh yang menguntungkan, oleh karena itu penulis menyarankan kepada pemerintah daerah untuk terus konsisten membantu masyarakat miskin agar tidak terjadi disparitas antar masyarakat desa di kemudian hari. Kepada pemerintah kota dan federal: Selalu berikan bantuan berkualitas tinggi kepada mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2015. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Akib, Irwan, Risfaisal, (2016). *Bantuan Langsung Tunai*. *Jurnal Equilibrium*. FKIP Unismuh Makassar, Volume II No.2 Februari 2016. Makassar.
- Amrullah ER, Ishida A, Pullaila A, Rusyiana A. 2019. Who suffers from food insecurity in Indonesia? *Int J Soc Econ*. 46(10):1186-1197. doi:10.1108/IJSE-03-2019-0196.
- Arfiansyah, M.A. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020, hlm. 68-82.
- Azwardi & Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No. (1), hlm: 29-4
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Sosial Dan Kependudukan 2019*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia*: Jakarta.
- Ferezagia, D.V.2018. Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Vol. 1, No. 1 Desember 2018, hlm. 1.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(04), 39–53.
- Hodijah, S. 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* Vol. 4, No. 2 November 2017, hlm. 156-173.
- Intan Mala Sari dan M Faisal Abdullah, 2017. Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Istijanto, (2017). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hlm. 93. Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta.
- Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penaggulangan COVID-19 Di Desa Melalui APBDesa
- Jacobus, H.E., Dkk. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Eumah Tangga Di Sulawesi Utara. Vol.12.No.3 2018, hlm. 87.
- Kuncoro M. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lalira, D., dkk. 2018. Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 04 Tahun 2018, hlm. 62-72.



- Lembaga Penelitian SMERU, (2021). *'Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia'*. Jakarta.
- Nurmiza. 2014. Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat. Skripsi [internet]. [diakses 11 Des2020]. <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/05/Naskah-Publikasi-Nurmiza.pdf>
- Pananrangi, A.I.A. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Plano Madani* Vol. 1 No. 1 2012 hlm. 29-38.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Pieters H, Vandeplass A, Guariso A, Francken N, Sarris A, Swinnen J, Gerber N, Braun J, Torero M. 2012.
- Putra, H. S. 2018. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol.2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 51-61.
- Rahel Ignatia, (2018). *Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai*". Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Rimawan, M & Aryani, F. 2019. Pengaruh Alokasi dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9 No. 3 September-Desember 2019, hlm. 287-295.
- Romi, S & Umiyati, E. 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7 No. 1, Januari-April 2018, hlm. 1-7.
- Rosfadhila M, Toyamah N, Sulaksono B, Devina S. Sodo RJ, Syukri M. 2013. Kajian pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) 2008 dan evaluasi penerima program BLT 2005 di Indonesia. Bogor (ID): Lembaga Penelitian SMERU.
- Rusdarti, Sembayang LK. 2013. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, Volume 9 No. 1 April 2013
- Safitri, RI. 2015. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan : Analisis Data Provinsi di Indonesia 2010. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.



- Safuridar dan Novera Dwi Suci, (2017). *Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur*. Universitas Samudra, Aceh 2017.
- Septa Muliadi Ginting, (2015). *Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Kota Medan (Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai/Blt Kecamatan Medan Belawan)*. Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Subanti S, Respatiwan, Winiota, S, Hakim AH. 2016. The impact of direct cash transfer program (BLT) on household consumption in Central Java province. AIP Conf Proc. 1746, 020054 (2016). doi:10.1063/1.4953979.
- Sugiarto, Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2015). *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro*. Argo Ekonomi 26 (3), 115-120, Jawa Timur 2015.
- Sugiono. (2012). *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung, alfabeta.
- Syafruddin, Muhammad I, Aziz K, (2021). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. Vol. 9, No.2. Agustus 2021.
- Tiwari S, Daidone S, Ruvalcaba MA, Prifti E, Handa S, Davis B, Niang O, Pellerano L, Ufford PQ, Seidenfeld D. 2016. Impact of cash transfer programs on food security and nutrition in sub-Saharan Africa: a crosscountry analysis. Glob Food
- Wahyudin, dkk. 2019. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupate Nagan Raya. Jurnal Nuansa, Vol. 16 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 181-193.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1998 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.